



TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
INOVASI
INKLUSIF

Kementerian PPN/
Bappenas



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

Keterbukaan Pemerintah: “Membangun Kemitraan Efektif Pemerintah dengan Masyarakat”

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Tantangan Keterbukaan Pemerintah dalam Membangun Kemitraan yang Efektif



Urgensi Transformasi Indonesia

Indonesia sudah terjebak dalam *Middle Income* Selama 30 tahun

Hanya tersisa waktu selama 22 tahun, untuk menaikkan GNI per Capita 4x Lipat

Agar diatas threshold High Income Economy

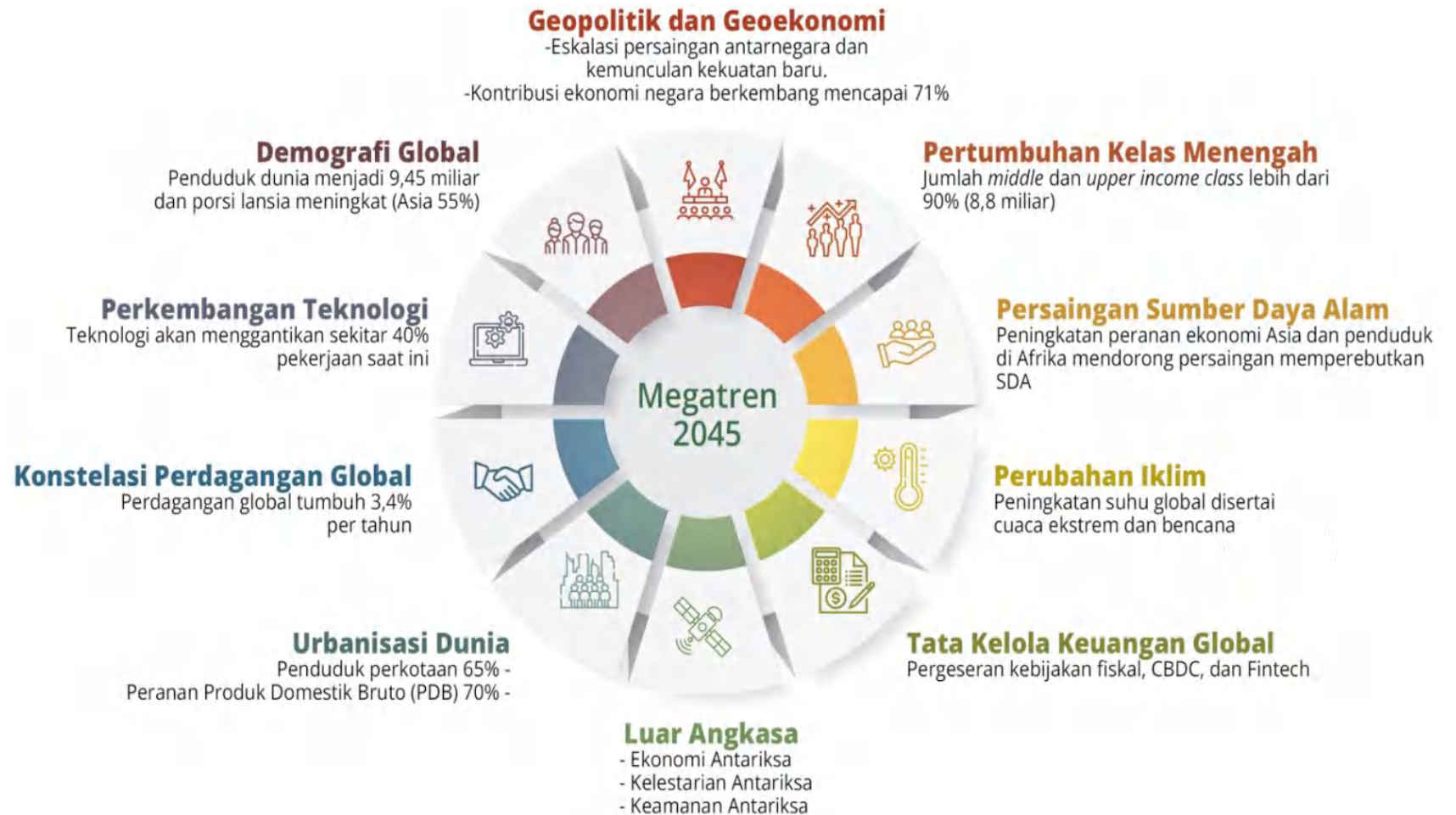


Sumber: World Bank (2022), Proyeksi Bappenas per Desember 2022

*Proyeksi *Threshold High Income* dihitung dari trend inflasi SDR

Tantangan Global ke Depan

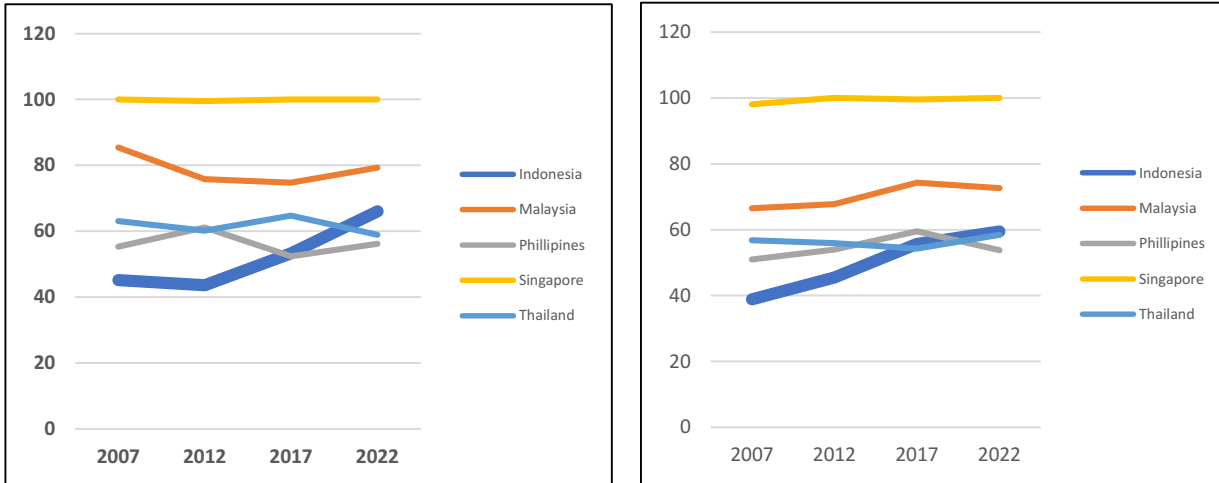
Megatren global yang penting dalam 20 tahun ke depan akan merubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan sistem keuangan digital.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (Disampaikan dalam Sosialisasi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029, 9 Oktober 2023)

Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

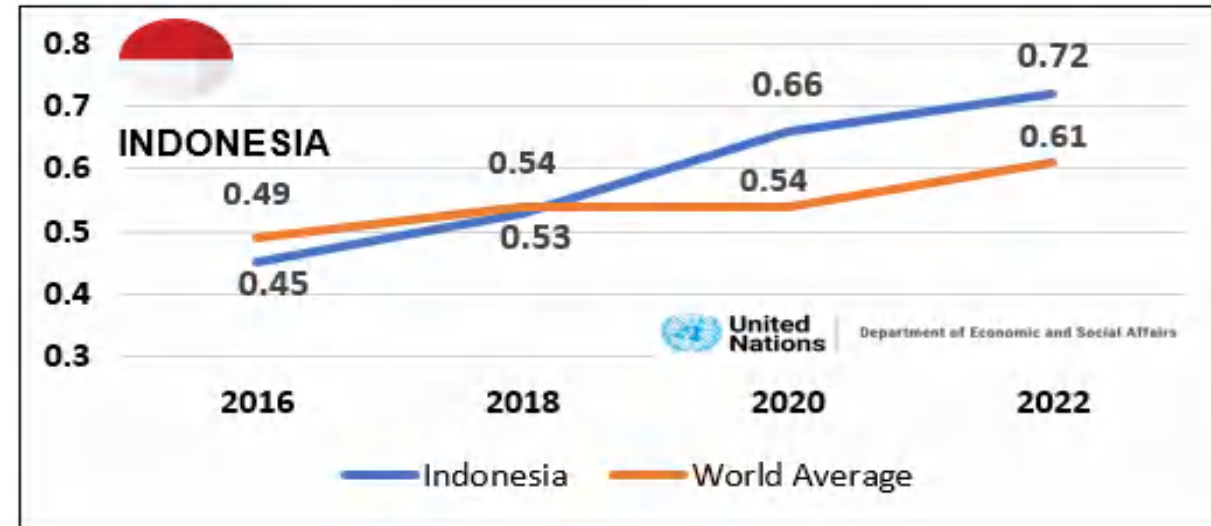
Skor *Government Effectiveness* dan *Regulatory Quality* Indonesia 2007-2022



- Pada dimensi **Government Effectiveness**, capaian Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia tertinggal di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand;
- Sedangkan pada dimensi **Regulatory Quality**, Indonesia tertinggal di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand, meskipun telah dilakukan perbaikan melalui reformasi dan simplifikasi regulasi.

Sumber: *Worldwide Governance Indicators, 2020, diolah*

Capaian Skor *E-Government Development Index* Indonesia, 2016-2022



- Capaian Indonesia sepanjang tahun 2016 sampai 2022 menunjukkan tren peningkatan, dimana Indonesia berada di atas rata-rata dunia (0,72 di tahun 2022), yang sebagian besar dikontribusikan oleh skor *Human Capital Index* dan *Online Service Index*;
- Skor *Telecommunication Infrastructure Index* mengalami perbaikan namun masih di bawah rata-rata regional Asia Tenggara;

Sumber: *United Nations, diolah*

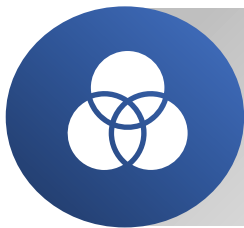
Urgensi Keterbukaan Pemerintah dalam Membangun Kemitraan yang Efektif



Pemajuan implementasi nilai-nilai keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusivitas



Pengarusutamaan kerjasama aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam pembangunan melalui penerapan prinsip kokreasi



Penguatan ekosistem yang kondusif bagi praktik keterbukaan pemerintah, mencakup kerangka regulasi dan kelembagaan yang solid, kepemimpinan yang terbuka dan konstruktif, sumber daya yang mencukupi, dan pemanfaatan teknologi digital



Linkage dan integrasi antara aksi keterbukaan pemerintah, dokumen perencanaan pembangunan nasional, dan strategi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Kemitraan Efektif Pemerintah dengan Masyarakat dalam Perspektif Global dan Nasional



DEFINISI PARTISIPASI INKLUSIF DALAM PEMBANGUNAN



PBB mendefinisikan inklusi sebagai:
*“Inclusion as the process of improving the terms of **participation** in society for people who are disadvantaged on the basis of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion, or economic or other status, through **enhanced opportunities, access to resources, voice and respect for rights.**”*

World Bank mendefinisikan inklusif sebagai:
*“The process of **improving** the ability, opportunity, and dignity of people, disadvantaged on the basis of their identity, to **take part in society.**”*

The Open Government Declaration
*“We value **public participation** of all people, **equally** and **without discrimination**, in decision making and policy formulation. Public engagement, including the **full participation** of women, increases the effectiveness of governments, which benefit from people’s knowledge, ideas and ability to provide oversight.”*

4 Effective Principles dalam Kerjasama Pembangunan

Country Ownership



Negara berkembang perlu terlibat dalam perancangan, implementasi, hingga money untuk memastikan kerja sama pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas negara tersebut

Focus on Result



Diperlukan tujuan, target, dan indikator yang jelas dan terukur dalam pencapaian kerja sama pembangunan

Inclusive Partnership



Kerja sama pembangunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan selain pemerintah seperti swasta, CSOs, akademisi agar tidak ada satupun yang tertinggal (no-one left behind)

Transparency and Mutual Accountability




Memastikan proses kerja sama pembangunan yang transparan serta informasi tentang kerja sama tersedia secara publik, serta responsif terhadap kebutuhan berbagai pihak.

Busan Partnership Agreement (2011) mengeluarkan 4 Effective Principles yang terdiri dari:

- Country Ownership
- Focus on Result
- **Inclusive Partnership**
- **Transparency and Mutual Accountability**

Sumber: Busan Partnership Agreement, 2011

Tahapan Pelibatan Masyarakat menurut International Association for Public Participation Spectrum

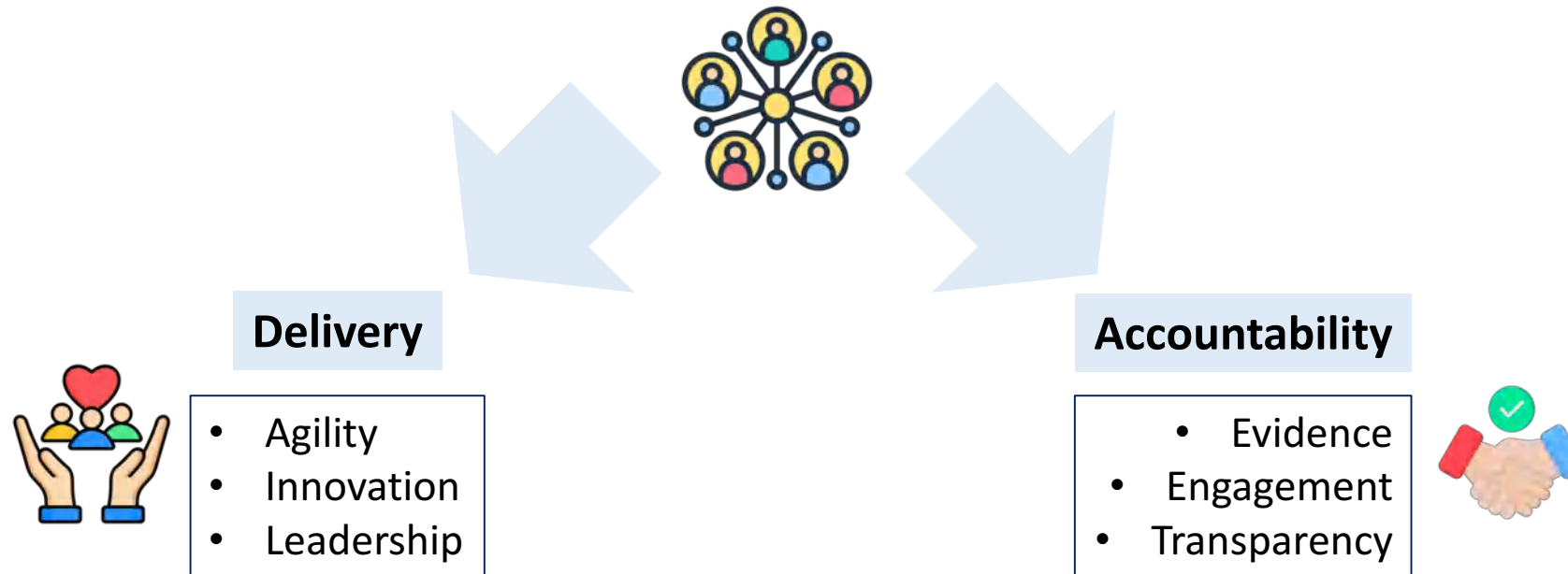
INCREASING IMPACT ON THE DECISION 

	INFORM	CONSULT	INVOLVE	COLLABORATE	EMPOWER
PUBLIC PARTICIPATION GOAL	To provide the public with balanced and objective information to assist them in understanding the problem, alternatives, opportunities and/or solutions.	To obtain public feedback on analysis, alternatives and/or decisions.	To work directly with the public throughout the process to ensure that public concerns and aspirations are consistently understood and considered.	To partner with the public in each aspect of the decision including the development of alternatives and the identification of the preferred solution.	To place final decision making in the hands of the public.
PROMISE TO THE PUBLIC	We will keep you informed.	We will keep you informed, listen to and acknowledge concerns and aspirations, and provide feedback on how public input influenced the decision.	We will work with you to ensure that your concerns and aspirations are directly reflected in the alternatives developed and provide feedback on how public input influenced the decision.	We will look to you for advice and innovation in formulating solutions and incorporate your advice and recommendations into the decisions to the maximum extent possible.	We will implement what you decide.

Strategi Kolaborasi Kebijakan antar Stakeholders

Collaborative Governance (Jejaring Kebijakan) merupakan suatu upaya yang berorientasi pada solusi serta berfokus pada implementasi nilai-nilai partisipasi publik, di mana terdapat beragam pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama dan berjejaring untuk meningkatkan proses serta kualitas kebijakan dan pelayanan publik (Global Partnership for Social Accountability)

Collaborative Framework



Sumber: *Collaborative Capacity in Public Service Delivery Towards a Framework for Practice*, UNDP, diolah

Dalam menguatkan **Delivery** dalam membangun kemitraan yang efektif dilakukan melalui:

- Pemerintah perlu untuk mampu **beradaptasi** dengan lingkungan dan aktor
- Kemampuan untuk menemukan **peluang dan inovasi** kemitraan
- Komitmen serta **kepemimpinan** dalam membangun kemitraan

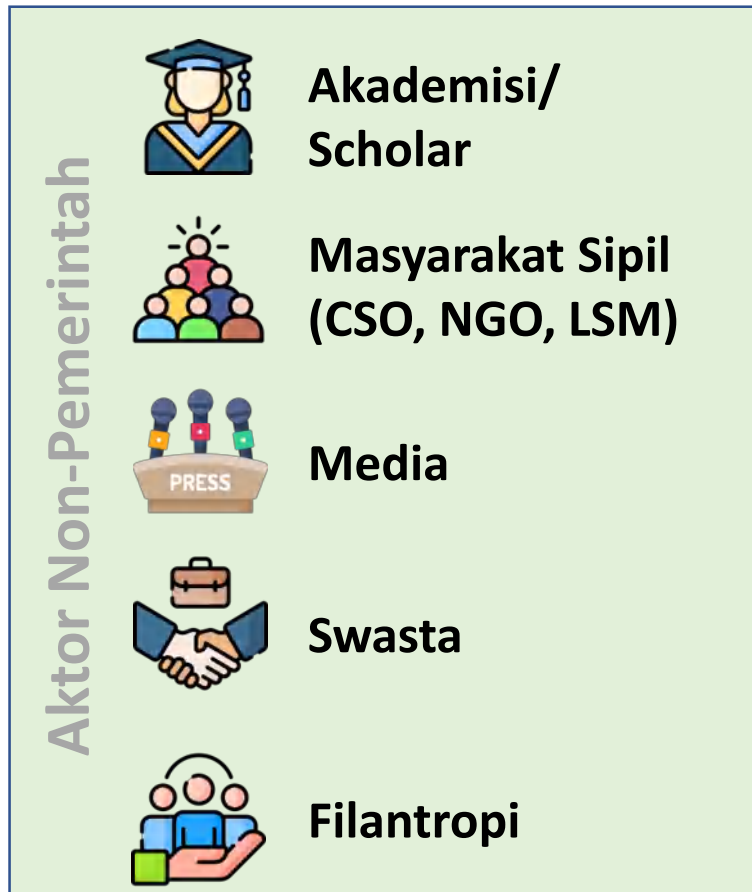
Kemitraan yang efektif dapat dikuatkan dengan aspek **Accountability** yang terdiri atas:

- Melakukan **pendekatan dan kolaborasi berlandaskan bukti** yg akuntabel
- Membuka peluang seluasnya untuk **pelibatan** aktor non-pemerintah
- Mendorong **transparansi** dalam seluruh rangkaian kolaborasi antar aktor

Aktor Strategis dalam Membangun Kemitraan



Pemerintah
(Pusat/Daerah)



Sumber-Sumber Aktor Strategis dapat diidentifikasi melalui wilayah cakupan yang terdiri atas:



Lokal/Daerah



Nasional



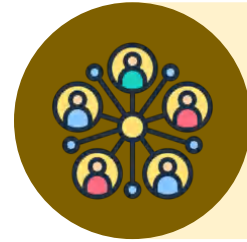
Internasional

Merangkul Aktor **Internasional** menjadi salah satu peluang strategis Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan pencapaian pembangunan.

Manfaat Kemitraan yang Efektif dalam Pembangunan



Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Pelayanan Publik



Meningkatkan Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Proses Perencanaan Pembangunan



Mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang



Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan



Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

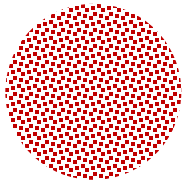


Mengakselerasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sumber: Beisheim dan Simon (2017), dalam Panduan Kemitraan Multipihak Untuk SDGs, Kementerian PPN/Bappenas

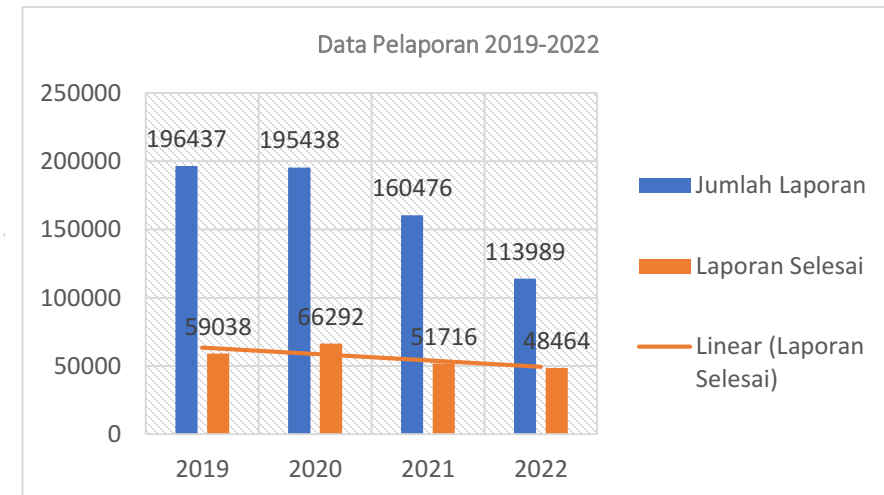
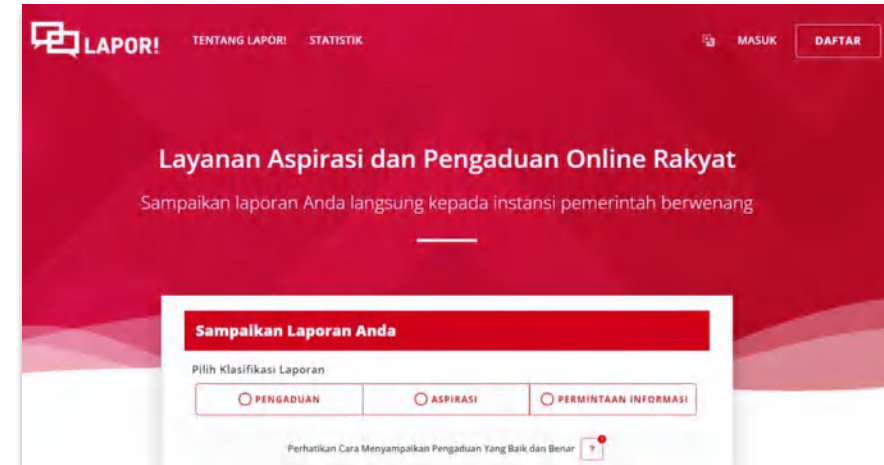
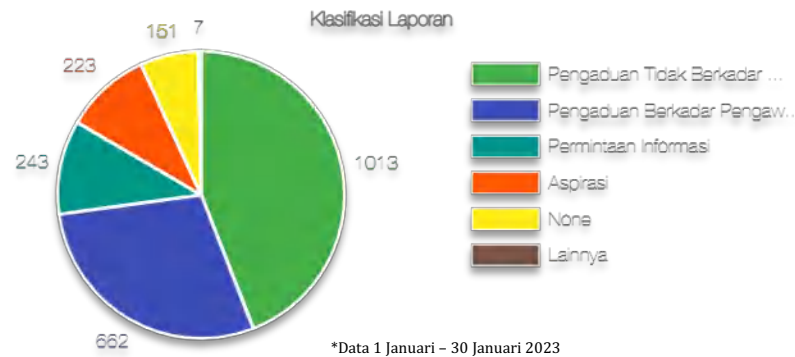
Contoh Praktik Baik Kemitraan Pemerintah- Masyarakat melalui Ko-kreasi

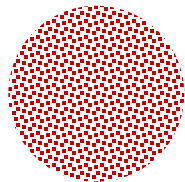




Contoh Praktik Baik Ko-kreasi 1: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

- LAPOR dikembangkan secara ko-kreasi antara PAN-RB dan PATTIRO
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan layanan *Complaint Handling Mechanism* (www.lapor.go.id) yang terintegrasi dengan aplikasi pengaduan lainnya
- Portal dibangun dengan tujuan untuk menampung aduan, aspirasi, dan pelaporan masyarakat atas pelayanan publik pada seluruh tingkatan.
- LAPOR! dalam pengembangannya dapat menjadi *Big Data* kondisi pelayanan publik di Indonesia.
- LAPOR! membuka akses bagi masyarakat yang ingin memperoleh data/informasi aduan pelayanan publik melalui fitur “Statistik”





Contoh Praktik Baik Ko-Kreasi 2: Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



E-Katalog

Platform yang menampilkan daftar penyedia barang dan jasa pemerintah yang inklusif



INAPROC

Platform yang menyajikan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa



Opentender.net

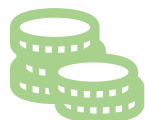
Platform hasil ko-kreasi ICW-LKPP untuk menampilkan daftar dugaan terjadinya *fraud* dalam Pengadaan Barang dan jasa

Membuka Kesempatan UMKM terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa



Rp 82 Triliun

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dimenangkan oleh UMKM



Rp 22,5 Triliun

Peningkatan transaksi PBJ yang dimenangkan oleh UMKM tiap tahun



LKPP bersama ICW mendapatkan penghargaan juara ke-2 OGP Impact Awards, di Korea Selatan Tahun 2021



TERIMA KASIH



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
Gedung MR 21, Lantai 11
Jalan Menteng Raya 21, DKI Jakarta 10340

www.ogi.bappenas.go.id
[Sekretariat.ogi@bappenas.go.id](mailto:sekretariat.ogi@bappenas.go.id)



sekretariat.ogi@bappenas.go.id |



[@opengovindo](https://www.instagram.com/opengovindo) |



[Open Government Indonesia](https://www.youtube.com/OpenGovernmentIndonesia)